

Tim Penulis:

**Hendra Permana, Yunita Fourina Dewi, Susniwati,
Jiwa Riwayanti, Mokhammad Wahyudin, Atik Rochaeni,
Gina Sofia Rahman, Arnie Fajar, Arus Reka Prasetya,
Hendri Darma Putra, Nining Latianingsih, Diana Sukorina,
Praniko Imam Sagita, Oom Yomi Romlah**

MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

**Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran
Kinerja Pemerintahan Modern**

Editor:

**Raden Minda Kusumah
Desta Sulaesih Mursyidah**



MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran
Kinerja Pemerintahan Modern

Tim Penulis:

**Hendra Permana, Yunita Fourina Dewi, Susniwati,
Jiwa Riwayanti, Mokhammad Wahyudin, Atik Rochaeni,
Gina Sofia Rahman, Arnie Fajar, Arus Reka Prasetia,
Hendri Darma Putra, Nining Latianingsih, Diana Sukorina,
Praniko Imam Sagita, Oom Yomi Romlah**

**MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK:
Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern**

Tim Penulis:

**Hendra Permana, Yunita Fourina Dewi, Susniwati,
Jiwa Riwayanti, Mokhammad Wahyudin, Atik Rochaeni,
Gina Sofia Rahman, Arnie Fajar, Arus Reka Prasetya,
Hendri Darma Putra, Nining Latianingsih, Diana Sukorina,
Praniko Imam Sagita, Oom Yomi Romlah**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Raden Minda Kusumah
Desta Sulaesih Mursyidah**

ISBN:

978-634-317-208-6 (PDF)

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, teori, metode, dan praktik *monitoring* serta evaluasi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas kebijakan publik. Pembahasan dalam buku ini mencakup aspek dasar *monitoring* dan evaluasi, teori kebijakan publik, pengukuran kinerja pemerintahan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan modern.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, aparatur pemerintah, dan praktisi sektor publik dalam memahami serta menerapkan *monitoring* dan evaluasi kebijakan secara lebih efektif. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bandung, Agustus 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 KONSEP DASAR MONITORING DAN EVALUASI	
KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Pengertian <i>Monitoring</i> dalam Kebijakan Publik	2
B. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik	5
C. Tujuan dan Fungsi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	9
D. Prinsip-Prinsip <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	10
E. Peran <i>Monitoring</i> dan Evaluasi dalam Pemerintahan Modern	14
BAB 2 TEORI DAN PARADIGMA KEBIJAKAN PUBLIK	19
A. Konsep dan Karakteristik Kebijakan Publik	20
B. Paradigma Administrasi Publik Modern	23
C. Teori Implementasi Kebijakan	26
D. Pendekatan <i>Good Governance</i> dalam Kebijakan Publik	30
E. Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence Based Policy</i>)	31
BAB 3 SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK DAN POSISI MONITORING	
EVALUASI.....	37
A. Perumusan Masalah Kebijakan	39
B. Penyusunan Agenda Kebijakan	43
C. Implementasi Kebijakan Publik	47
D. <i>Monitoring</i> dalam Siklus Kebijakan Publik	53
E. Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Kebijakan	56
BAB 4 PERENCANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN	61
A. Penyusunan Kerangka <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	62
B. Penetapan Tujuan dan Sasaran Evaluasi	65
C. Identifikasi Pemangku Kepentingan	67
D. Penyusunan Jadwal dan Anggaran Evaluasi	70
E. Penyusunan Instrumen <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	72

BAB 5 INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA

PEMERINTAHAN	77
A. Konsep Kinerja Pemerintahan	78
B. Jenis dan Karakteristik Indikator Kinerja	81
C. Pengukuran <i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan <i>Impact</i>	85
D. Penyusunan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI)	87
E. Standar dan Target Kinerja Pemerintah	91

BAB 6 METODE MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK..... 95

A. <i>Monitoring</i> Administratif	97
B. <i>Monitoring</i> Lapangan dan Supervisi	99
C. <i>Monitoring</i> Partisipatif	102
D. <i>Monitoring</i> Berbasis Teknologi Informasi	105
E. Analisis Hasil <i>Monitoring</i> Kebijakan	108

BAB 7 METODE EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK..... 113

A. Evaluasi Formatif dan Sumatif	115
B. Evaluasi Proses Kebijakan	117
C. Evaluasi Dampak Kebijakan	120
D. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi	123
E. Evaluasi Berbasis Kinerja	127

BAB 8 TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 131

A. Teknik Observasi dalam Evaluasi	133
B. Wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah (<i>Focus Group Discussion/FGD</i>).....	136
C. Survei dan Penyusunan Kuesioner	140
D. Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif	149
E. Validitas, Reliabilitas, dan Objektivitas Data	153

BAB 9 MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS DIGITAL..... 159

A. Transformasi Digital Pemerintahan	160
B. Sistem Informasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	162
C. Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam Kebijakan Publik	165
D. <i>Artificial Intelligence</i> dalam Evaluasi Kebijakan	168
E. Keamanan Data dan Etika Digital Pemerintahan	171

BAB 10 AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN	175
A. Konsep Akuntabilitas Publik	176
B. Transparansi dalam Pengelolaan Kebijakan	179
C. <i>Monitoring</i> sebagai Instrumen Pengawasan	182
D. Evaluasi untuk Peningkatan Akuntabilitas	185
E. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Publik	188
BAB 11 MONITORING DAN EVALUASI SEKTOR PUBLIK	193
A. Evaluasi Kebijakan Pendidikan	197
B. Evaluasi Kebijakan Kesehatan	202
C. <i>Monitoring</i> Program Sosial dan Kemiskinan	206
D. Evaluasi Infrastruktur dan Pelayanan Publik	210
E. <i>Monitoring</i> Kebijakan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	215
BAB 12 HAMBATAN DAN TANTANGAN MONITORING DAN EVALUASI	219
A. Permasalahan Sumber Daya Manusia	220
B. Keterbatasan Data dan Informasi	223
C. Hambatan Politik dan Birokrasi	226
D. Resistensi terhadap Evaluasi Kebijakan	229
E. Strategi Mengatasi Tantangan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	232
BAB 13 BEST PRACTICE MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN	237
A. Praktik <i>Monitoring</i> dan Evaluasi di Indonesia	238
B. Praktik <i>Monitoring</i> dan Evaluasi di Negara Maju	240
C. Inovasi <i>Monitoring</i> Berbasis Teknologi	243
D. Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat	247
E. Pembelajaran dari Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan	250
BAB 14 MASA DEPAN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	253
A. Tren <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Global	255
B. <i>Smart Government</i> dan <i>Digital Governance</i>	257
C. Penguatan Kapasitas Evaluator Kebijakan	260
D. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Berbasis Data <i>Real Time</i>	263

E. Arah Pengembangan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi di Indonesia	267
DAFTAR PUSTAKA	271
PROFIL PENULIS & EDITOR.....	287

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jenis <i>Monitoring</i> Kebijakan Publik	4
Gambar 1.2. Tipologi Evaluasi Kebijakan Publik: Dimensi Waktu dan Model CIPP	7
Gambar 2.1. Siklus Kebijakan Publik dan Posisi Strategis Monev	22
Gambar 2.2. Segitiga Implementasi Kebijakan dan Posisi Koordinasi sebagai Variabel Keempat.....	29
Gambar 2.3. Hierarki Bukti dalam Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence Based Policy</i>)	33
Gambar 3.1. Siklus Kebijakan Publik dan Posisi <i>Monitoring</i> serta Evaluasi ...	38
Gambar 4.1. <i>Logic Model/Results Chain</i> dalam Kerangka <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	64
Gambar 4.2. Matriks Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan	69
Gambar 4.3. Alur Penyusunan Instrumen <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan	74
Gambar 5.1. Enam Dimensi Pengukuran Kinerja Pemerintahan	80
Gambar 5.2. Rantai Hasil: Hubungan <i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan <i>Impact</i> dalam Evaluasi Kinerja.....	84
Gambar 5.3. Tahapan Penyusunan KPI dan Prinsip SMART	89
Gambar 6.1. Kerangka Metode <i>Monitoring</i> Kebijakan Publik	96
Gambar 6.2. Alur Analisis Hasil <i>Monitoring</i> Kebijakan Publik.....	110
Gambar 7.1. Kerangka Metode Evaluasi Kebijakan Publik.....	114
Gambar 7.2. Hubungan Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Kebijakan Publik	126
Gambar 9.1. Ekosistem Terpadu <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Berbasis Digital.	167
Gambar 10.1. Lima Dimensi Akuntabilitas Publik dan Peran Strategis <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	177
Gambar 10.2. Ekosistem Pengawasan Publik Partisipatif dalam <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan	190

Gambar 11.1. Model Sinkronisasi Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan	218
Gambar 12.1. Permasalahan Sumber Daya Manusia dalam <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	222
Gambar 12.2. Kerangka Strategi Penguatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	234
Gambar 13.1. Perbandingan Karakteristik Sistem <i>Monitoring</i> dan Evaluasi: Negara Maju vs Indonesia.....	242
Gambar 13.2. Model Kolaborasi Tiga Aktor dalam <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	246
Gambar 14.1. Kerangka Masa Depan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	254
Gambar 14.2. Siklus <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Berbasis Data <i>Real Time</i> dalam Tata Kelola Pemerintahan Digital.....	264

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	8
Tabel 1.2. Prinsip-Prinsip <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kebijakan Publik.....	11
Tabel 2.1. Karakteristik Kebijakan Publik dan Implikasinya bagi Monev	21
Tabel 2.2. Evolusi Paradigma Administrasi Publik dan Implikasinya bagi Monev	25
Tabel 8.1. Perbandingan Jenis-Jenis Survei	144
Tabel 9.1. Komponen Utama Sistem Informasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Digital	163
Tabel 9.2. Risiko dan Mitigasi AI dalam Evaluasi Kebijakan.....	169



KONSEP DASAR *MONITORING* DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan dua instrumen fundamental dalam siklus manajemen kebijakan publik modern. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme pembelajaran organisasional yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, pemahaman mendalam tentang konsep dasar Monev menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh para penyelenggara negara dan pemangku kepentingan kebijakan.

Dunn (2018) dalam bukunya *Public Policy Analysis* mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik yang komprehensif tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap hasil-hasil yang dicapai. Kebijakan publik yang baik bukan hanya kebijakan yang dirumuskan dengan tepat, tetapi juga kebijakan yang dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Howlett *et al.* (2020) yang menegaskan bahwa siklus kebijakan tidak akan pernah sempurna tanpa adanya tahap evaluasi yang kritis dan berbasis bukti.



TEORI DAN PARADIGMA KEBIJAKAN PUBLIK

Pemahaman yang kokoh tentang teori dan paradigma kebijakan publik merupakan fondasi epistemologis yang tidak dapat diabaikan dalam membangun sistem *monitoring* dan evaluasi (Monev) yang efektif. Tanpa landasan teoretis yang kuat, praktik Monev cenderung menjadi aktivitas administratif mekanistik yang kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan pembelajaran kebijakan yang bermakna dan mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Bab ini mengkaji lima dimensi teoretis dan paradigmatis yang membentuk arsitektur intelektual Monev kebijakan publik kontemporer.

Kebijakan publik sebagai bidang studi dan praktik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak Harold Lasswell meletakkan fondasi ilmu kebijakan (*policy sciences*) pada tahun 1951. Dari pendekatan deskriptif yang sederhana, ilmu kebijakan publik telah berkembang menjadi disiplin yang kaya dengan berbagai teori, model, dan paradigma yang saling berdialog dan bahkan berkompetisi dalam menjelaskan fenomena pembuatan dan implementasi kebijakan (Howlett *et al.*, 2020). Perkembangan ini memberikan kerangka konseptual yang semakin canggih bagi pengembangan dan pelaksanaan Monev kebijakan publik.



SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK DAN POSISI *MONITORING* EVALUASI

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan tersebut tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang dikenal sebagai siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan menggambarkan keseluruhan tahapan yang dilalui suatu kebijakan, mulai dari identifikasi dan perumusan masalah publik, penentuan agenda kebijakan, penyusunan serta pengesahan kebijakan, pelaksanaan program, hingga penilaian terhadap hasil dan dampak yang ditimbulkan. Setiap tahapan dalam siklus tersebut memiliki peran yang berbeda, namun saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, *monitoring* dan evaluasi memegang peranan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pengendalian, serta pembelajaran untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Dunn (2018), siklus kebijakan publik terdiri atas serangkaian aktivitas yang mencakup penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy*



PERENCANAAN *MONITORING* DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Perencanaan *monitoring* dan evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintahan modern, *monitoring* dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based policy*) (Dunn, 2018). Perencanaan *monitoring* dan evaluasi dilakukan sejak tahap awal perumusan kebijakan agar indikator kinerja, target capaian, metode pengumpulan data, dan mekanisme pelaporan dapat dirancang secara jelas dan terukur. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan pelaksanaan program dan tingkat pencapaian tujuan kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan (Rossi *et al.*, 2019).

Selain itu, perencanaan *monitoring* dan evaluasi memiliki peran penting dalam mendukung prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Melalui sistem *monitoring* dan evaluasi yang terstruktur, pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan antara target dan *realisasi* serta merumuskan langkah perbaikan yang

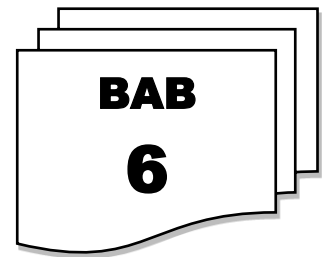


INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN

Indikator dan pengukuran kinerja pemerintahan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berorientasi pada hasil. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah dapat menilai tingkat keberhasilan program, efektivitas penggunaan sumber daya, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel (Hatry, 2014).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator yang menggambarkan pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan. Indikator tersebut tidak hanya mengukur aspek *input*, tetapi juga *output*, *outcome*, manfaat, dan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan atau program pemerintah. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dalam menilai keberhasilan organisasi publik (Mahmudi, 2015).

Selain mendukung akuntabilitas dan transparansi, pengukuran kinerja juga menjadi sarana pengendalian dan perbaikan organisasi. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi capaian, serta merumuskan langkah-langkah peningkatan kinerja secara berkelanjutan (Poister *et al.*, 2015). Di Indonesia, pengukuran kinerja telah menjadi bagian penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden



METODE *MONITORING* KEBIJAKAN PUBLIK

Monitoring kebijakan publik merupakan proses pemantauan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan, target, dan rencana yang telah ditetapkan. Selain sebagai alat pengawasan, *monitoring* juga berfungsi sebagai instrumen manajemen untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif (Dunn, 2018). Metode *monitoring* kebijakan publik mencakup berbagai teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah. Metode yang digunakan dapat berupa observasi lapangan, survei, wawancara, analisis dokumen, audit kinerja, maupun pemanfaatan teknologi digital. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan kualitas informasi yang dihasilkan untuk mendukung proses evaluasi dan perbaikan kebijakan (Kusek & Rist, 2019).

Dalam perkembangannya, *monitoring* tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil (*results based monitoring*), seperti *output*, *outcome*, dan dampak kebijakan bagi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menilai kontribusi kebijakan terhadap tujuan pembangunan secara lebih komprehensif (World Bank, 2023). Kemajuan teknologi informasi turut meningkatkan efektivitas *monitoring* melalui penggunaan *e-monitoring*, *dashboard* kinerja, dan sistem informasi



METODE EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Metode evaluasi kebijakan publik merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai keberhasilan, efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan publik karena memberikan informasi mengenai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Dunn, 2018). Dalam praktiknya, metode evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti evaluasi formatif, evaluasi sumatif, analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), survei, wawancara, observasi, dan analisis data kinerja. Pemilihan metode evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi, karakteristik program, dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Oleh karena itu, penggunaan metode evaluasi yang tepat akan menghasilkan informasi yang akurat untuk mendukung perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Rossi *et al.*, 2019). Dengan demikian, metode evaluasi kebijakan publik berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan, tetapi juga menjadi dasar bagi



TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Pengumpulan dan analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses *monitoring* dan evaluasi kebijakan publik. Keberadaan data menjadi fondasi utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang tepat. Dengan demikian, kualitas hasil *monitoring* dan evaluasi sangat bergantung pada mutu data yang diperoleh serta metode analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut. Menurut Rossi *et al.* (2004), evaluasi yang berkualitas harus didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan pengolahan data yang sistematis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun praktis.

Dalam era pemerintahan modern, kebutuhan terhadap data yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya semakin penting seiring meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan intuisi, asumsi, atau pertimbangan subjektif semata dalam merumuskan maupun mengevaluasi suatu kebijakan. Sebaliknya, setiap proses pengambilan keputusan perlu didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan serta analisis data yang terukur. Pendekatan ini dikenal sebagai

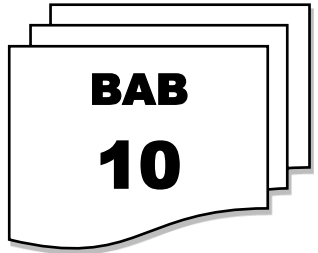


MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS DIGITAL

Perkembangan teknologi digital sudah mengubah cara pemerintah merancang, melaksanakan, memantau, hingga mengevaluasi kebijakan publik. Di masa lalu, *monitoring* dan evaluasi banyak bertumpu pada laporan administratif, rekapitulasi manual, kunjungan lapangan rutin, hingga dokumen pertanggungjawaban yang disusun setelah program berjalan. Pola ini tetap penting, namun belum cukup untuk menjawab tuntutan pemerintahan modern yang membutuhkan informasi cepat, data terintegrasi, keputusan yang responsif, serta akuntabilitas publik.

Monitoring dan evaluasi berbasis digital hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut. Melalui sistem informasi, dasbor kinerja, integrasi data, *big data analytics*, serta *Artificial Intelligence* (AI), pemerintah dapat memantau pelaksanaan program secara lebih rutin, membaca capaian kebijakan secara lebih tajam, serta mendeteksi hambatan implementasi sebelum menjadi kegagalan program. Dalam kerangka pemerintahan digital, data tidak hanya diperlakukan sebagai lampiran laporan, tetapi sebagai sumber informasi guna memperbaiki kebijakan secara kontinu.

Namun, digitalisasi *monitoring* dan evaluasi tidak boleh dipahami secara teknokratis. Aplikasi yang canggih tidak otomatis menghasilkan evaluasi yang baik. Data yang besar tak selalu berarti benar. Algoritma yang cepat tak selalu memahami konteks sosial. Karena itu, *monitoring* dan evaluasi berbasis



BAB 10

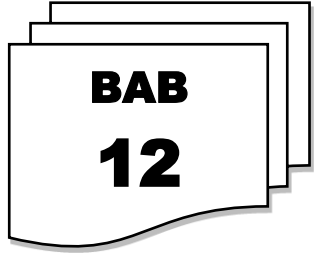
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN

Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan merupakan dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui serta mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan.

Di era reformasi dan digitalisasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang akuntabel dan transparan semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah mampu melaksanakan program pembangunan secara efektif, tetapi juga menuntut adanya keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta pertanggungjawaban yang jelas atas hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi melalui sistem *monitoring*, evaluasi, pelaporan kinerja, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Mahmudi, 2015).

MONITORING DAN EVALUASI SEKTOR PUBLIK

Monitoring dan evaluasi merupakan elemen yang sangat penting dalam tata kelola sektor publik modern karena berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa berbagai program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik, *monitoring* dan evaluasi tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai alat pengendalian manajemen yang membantu pemerintah menilai tingkat pencapaian tujuan pembangunan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi kebijakan. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah dituntut tidak hanya mampu melaksanakan program pembangunan, tetapi juga membuktikan bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, *monitoring* dan evaluasi menjadi sarana penting untuk mengukur kinerja program secara objektif, sistematis, dan berkelanjutan. Furubo dan Sandahl (2022) menjelaskan bahwa *monitoring* dan evaluasi telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem manajemen sektor publik karena mampu menyediakan informasi yang relevan bagi proses pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta penguatan pembelajaran organisasi (*organizational learning*).



BAB 12

HAMBATAN DAN TANTANGAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan instrumen penting dalam manajemen kebijakan publik yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan program serta menilai tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Monitoring* dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan mengukur efektivitas, efisiensi, dampak, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat (Subarsono, 2019). Melalui *monitoring* dan evaluasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, *monitoring* dan evaluasi kebijakan publik masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan yang sering ditemukan adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang tidak memadai dapat menyebabkan hasil evaluasi kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan (Nugroho, 2021). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang *monitoring* dan evaluasi juga menjadi kendala yang cukup signifikan, terutama pada organisasi pemerintah daerah.



BAB 13

BEST PRACTICE MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan instrumen strategis dalam memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari proses implementasinya, tetapi juga dari hasil dan dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan *best practice monitoring* dan evaluasi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Subarsono, 2019).

Best practice monitoring dan evaluasi kebijakan merujuk pada penerapan metode, prosedur, dan pendekatan yang telah terbukti berhasil dalam menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Nugroho (2021), sistem *monitoring* dan evaluasi yang baik harus mampu menghasilkan umpan balik (*feedback*) yang berkelanjutan sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *monitoring* dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi (*organizational learning*) dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.



BAB 14

MASA DEPAN *MONITORING* DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Masa depan *monitoring* dan evaluasi (Monev) kebijakan publik akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, pemanfaatan data besar (*big data*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. *Monitoring* dan evaluasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengawasan program, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based policy*) dan berorientasi pada hasil serta dampak bagi masyarakat. Menurut Nugroho (2021), kebijakan publik yang efektif memerlukan sistem informasi dan evaluasi yang mampu menyediakan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, Widodo (2021) menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital akan memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi melalui penyediaan informasi secara *real time*, sehingga pemerintah dapat merespons berbagai permasalahan publik dengan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, masa depan *monitoring* dan evaluasi kebijakan publik akan mengarah pada sistem yang lebih adaptif, partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K.A., Suparmi, Achadi, E.L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., & Shankar, A. H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75-102.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J.E. (2015). *Public policy making: An introduction* (8th ed.). Stamford: Cengage Learning.
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford: Oxford University Press.
- Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2018). Strategy, content and organizational performance: An empirical analysis. *Public Administration Review*, 78(3), 412-423.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, M. (2022). *Armstrong's handbook of performance management: An evidence based guide to delivering high performance* (7th ed.). London: Kogan Page.
- Babbie, E. (2020). *The practice of social research* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Sosialisasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) APBD Tahun 2023*. Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari <https://bappeda.jakarta.go.id>
- Bamberger, M. (2016). *Integrating big data into the monitoring and evaluation of development programmes*. United Nations Global Pulse.
- Bamberger, M., Vaessen, J., & Raimondo, E. (2016). *Dealing with complexity in development evaluation: A practical approach*. Thousand Oaks: Sage Publications.

- Bappenas. (2020). *Pedoman monitoring dan evaluasi pembangunan nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2022). *Laporan transformasi digital nasional 2022*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2021). *Cash transfers: What does the evidence say? a rigorous review of impacts and the role of design and implementation features*. London: Overseas Development Institute.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2015). *The politics of information: Problem definition and the course of public policy in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Berryhill, J., Heang, K. K., Clogher, R., & McBride, K. (2019). *Hello, world: Artificial intelligence and its use in the public sector*. OECD Working Papers on Public Governance, No. 36.
- Birkland, T. A. (2020). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (5th ed.). New York: Routledge.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2019). *Managing performance: International comparisons* (3rd ed.). London: Routledge.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford: Oxford University Press.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. London: Palgrave Macmillan.
- Carey, G., Malbon, E., & Reeders, D. (2020). *The anthropological lens in public health policy evaluation*. London: Routledge.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Rugby: Practical Action Publishing.
- Chopra, S. (2019). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (Edisi ke-7). Boston: Pearson.

- Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2021). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. Washington: World Bank Publications.
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1983). *Participation in American politics: The dynamics of agenda-building*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Cobb, R. W., Ross, J. K., & Ross, M. H. (1976). Agenda building as a comparative political process. *American Political Science Review*, 70(1), 126-138.
- Cochran, C. E., & Malone, E. F. (2014). *Public policy: Perspectives and choices* (5th ed.). Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Cousins, J. B., & Whitmore, E. (1998). Framing participatory evaluation. *New Directions for Evaluation*, 80, 5-23.
- Cracknell, B.E. (2019). *Evaluating development aid: issues, problems and solutions*. New Delhi: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Cummings, C. (2020). *Building effective monitoring and evaluation systems in public organizations*. London: Overseas Development Institute.
- Denhardt, J.V., & Denhardt, R.B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Dewi, L. P. W., Sastri, I. I. D. A. M., & Sanjaya, I. K. P. W. (2021). Pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas publik dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajerial pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 75-81.
- Dilapanga, A., & Rantung, M. (2022). *Monitoring dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Deepublish.

- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston: Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Estrella, M., & Gaventa, J. (2016). Who counts *reality*? Participatory *monitoring* and evaluation: A literature review. *IDS Working Paper*, 70, 1-54.
- Exworthy, M., Powell, M., & Glasby, J. (2021). *Understanding health policy* (3rd ed.). Bristol: Policy Press.
- Fathoni, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam akselerasi produk unggulan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Pesisir*, 8(2), 115-128.
- Fischer, F., Miller, G.J., & Sidney, M.S. (Eds.). (2015). *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*. New York: Routledge.
- Fitriani, N., & Suryanto, T. (2022). Pengaruh *monitoring* program terhadap efektivitas pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 55-68.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). *Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines* (4th ed.). Boston: Pearson Education.
- Flyvbjerg, B. (2021). *The Oxford handbook of megaproject management*. Oxford: Oxford University Press.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Furubo, J. E. and Sandahl, R. (2022). *Evaluation and public sector reform: New directions in evaluation theory and practice*. London: Routledge.
- Furubo, J. E., & Sandahl, R. (2018). *A diffusion perspective on global developments in evaluation*. New Brunswick: Transaction Publishers.

- Furubo, J. E., Rist, R. C., & Sandahl, R. (Eds.). (2002). *International atlas of evaluation*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Gaol, N. T. L. (2022). 'Policy process in the context of education: A content analysis. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 1-12.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact evaluation in practice* (2nd ed.). Washington: The World Bank.
- Giest, S. (2017). Big data for policymaking: Fad or fast track? *Policy Sciences*, 50(3), 367-382.
- Goldman, I., Engela, R., Akhalwaya, I., Gasa, N., Leon, B., Mohamed, H., & Ogbe, E. (2018). The national evaluation system of South Africa: What has been achieved in the first 5 years? *African Evaluation Journal*, 6(1), 1-14.
- Greer, S. L., King, E. J., Massard da Fonseca, E. and Peralta-Santos, A. (2022). *Coronavirus politics: The comparative politics and policy of COVID-19*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Grindle, M.S. (2017). Good governance, R.I.P.: A critique and an alternative. *Governance*, 30(1), 17-22.
- Hardiansyah. (2022). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hatry, H. P. (2014). *Performance measurement: Getting results* (2nd ed.). Washington: Urban Institute Press.
- Head, B. W. (2016). Toward more 'evidence-informed' policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472-484.
- Heeks, R. (2018). *Information and communication technology for development (ICT4D)*. London: Routledge.
- Hidayat, R. R., & Sari, M. (2021). Strategi transformasi digital di sektor publik: Studi kasus pemerintah daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(2), 67-80. <https://doi.org/10.30996/jra.v9i2>
- Hilabi, S., Savina, S., & Khairunisa, S. (2025). Pemanfaatan data analitik dalam big data: Studi kasus implementasi di pemerintahan. *JATISI*, 12(1).

<https://doi.org/10.35957/jatisi.v12i1.10916>

- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Hood, C., & Dixon, R. (2015). *A government that worked better and cost less? evaluating three decades of reform and change in UK Central Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: principles and processes* (4th ed.). Don Mills: Oxford University Press.
- Janssen, M., & Kuk, G. (2016). The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance. *Government Information Quarterly*, 33(3), 371-377.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2019). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258-268.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *BINTANG*, 3(2), 215-227.
- Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (2011). *The program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Jurnal Kajian Pemerintah. (2023). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 115-130.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). (2022). *Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2022*. Jakarta: Kementerian PAN-RB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2021). *Panduan teknis penyelenggaraan SAKIP*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Materi workshop e-Monev K/L 9 Juni 2023*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Boston: Pearson.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kurniawan, A., & Nugroho, D. (2023). Implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 14(2), 101-118.
- Kusek, J.Z. and Rist, R.C. (2019). *Ten steps to a results based monitoring and evaluation system: A handbook for development practitioners* (2nd ed). Washington: World Bank.
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai benang kusut kebijakan pendidikan Indonesia: Sebuah literature review analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1-15.
- Leeuw, F.L., & Furubo, J. E. (2018). Evaluation systems: What are they and why study them? *Evaluation*, 24(1), 3-14.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Laporan inovasi pelayanan publik 2021*. Jakarta: LAN. <https://www.lan.go.id/publikasi>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2023). *Pedoman evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2023). *Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam reformasi birokrasi Indonesia*. Jakarta: LAN RI.
- Mahendra, F., & Nurani, I. (2023). Digital public service innovation: Citizen-centric perspectives in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 10(1), 51-70. <https://doi.org/10.31289/ijpa.v10i1>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran kinerja sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mayne, J. (2017). Theory of change analysis: Building robust theories of change. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 32(2), 155-173.
- Mayne, J. (2019). *Monitoring performance in the public sector: Future directions from international experience*. New York: Routledge.

- Mayne, J. W., & Zapico-Goñi, E. (Eds.). (1997). *Monitoring performance in the public sector: Future directions from international experience*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.
- McCombs, M. (2018). *Setting the agenda: Mass media and public opinion* (3rd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- Mertens, D.M. (2018). *Research and evaluation in education and psychology: integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moynihan, D. P. (2018). *The dynamics of performance management: Constructing information and reform*. Washington: Georgetown University Press.
- Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2017). The role of organizations in fostering public service motivation. *Public Administration Review*, 77(1), 40-53.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, D. (2020). Pengaruh implementasi e-government terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112-124.
- Mulyono, S. (2017). *Sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursalin, Natsir, N., & Anas, M. (2024). Efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Student Research Journal*, 2(4), 397-406.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77-88. <https://doi.org/10.56855/intel.v1i1.112>

- National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework: AI RMF 1.0* (NIST AI 100-1).
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST cybersecurity framework (CSF) 2.0* (NIST CSWP 29).
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Nugroho, H. (2024). *Sustainable regional development: Teori dan praktik pembangunan ekonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Aksara Jaya.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Nurcholis, H. (2022). *Monitoring dan evaluasi kebijakan publik: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhidayah, S., & Pratama, R. (2024). Transparansi hasil evaluasi program pemerintah dan pengaruhnya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45-59.
- Nutley, S.M., Walter, I., & Davies, H.T.O. (2007). *Using evidence: How research can inform public services*. Bristol: The Policy Press.
- OECD. (2020). *Development co-operation report 2020: Learning from crises, building resilience*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2020). *Digital government index 2019: Conceptual framework and methodology*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Public Governance Policy Papers, No. 02.
- OECD. (2021). *Applying evaluation criteria thoughtfully*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Building capacity for evidence-informed policymaking: Lessons from OECD countries*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Digital government review: Strengthening public sector performance through digital transformation*. Paris: OECD Publishing.

- OECD. (2021). *Good practice principles for data ethics in the public sector*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD AI principles*. OECD.AI Policy Observatory.
- Osborne, S.P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. New York: Routledge.
- Parmenter, D. (2015). *Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs* (3rd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Parsons, W. (2017). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic methods of policy analysis and planning* (3rd ed.). New York: Routledge.
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5), 1189-1208.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization focused evaluation* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peters, B.G., & Pierre, J. (2017). *The sage handbook of public administration* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Poister, T. H., Aristigueta, M. P., & Hall, J. L. (2015). *Managing and measuring performance in public and nonprofit organizations: An integrated approach* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Pradana, A., & Wijaya, K. (2019). Analisis kelayakan ekspor komoditas mangga gedong gincu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Hortikultura dan Agroindustri*, 7(3), 201-214.

- Pradana, M., Yusuf, M., & Nugraha, R. A. (2023). Collaborative governance in Indonesia: Institutional transformation toward sustainable development. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 87-104.
<https://doi.org/10.31506/jap.v19i2.12345>
- Prasetia, A. R. (2026). AI-powered *platform* business models: A systematic literature review of digital ecosystems for sustainable competitive advantage. *International Conference on Education, Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance*, 4(1).
- Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2023). Digital *monitoring* system and public sector *performance* improvement. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 145-160.
- Prasetyo, P. E., & Firdaus, M. (2022). Infrastructure development and regional economic growth in Indonesia. *Journal of Infrastructure Development*, 14(2), 101-118.
- Pratama, Y., & Nugroho, A. (2023). Sistem pengaduan masyarakat berbasis digital dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(2), 134-149.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Priyatno, D., & Suharto, E. (2022). Efektivitas SAKIP dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 78-96.
- Purwanto, E.A., & Sulistyastuti, D.R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, A. R., & Yuyetta, E. N. A. (2022). Keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(2), 112-126.
- Rahman, A., & Kurniawati, D. (2023). Evaluasi berbasis *outcome* dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 14(2), 120-136.

- Rahmawati, D., & Firmansyah, R. (2024). Pengawasan partisipatif dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(1), 88-104.
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018). A theory of participation: What makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, 26(S1), S7-S17.
- Riastuti, K., & Winarno, A. (2022). Digitalisasi sistem *monitoring* program pembangunan daerah: Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal ilmu administrasi publik*, 10(1), 45-62.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sabatier, P.A., & Weible, C.M. (Eds.). (2014). *Theories of the policy process* (3rd ed.). Boulder: Westview Press.
- Sabrina, J. A., & Mubayyinah, L. (2023). Optimalisasi pengambilan keputusan melalui analisis big data pada bidang kebijakan publik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 130-138. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/272>
- Santosa, P.B., & Wahyudi, A. (2021). Tantangan implementasi sistem *monitoring* dan evaluasi di daerah: Analisis kapasitas kelembagaan. *Jurnal administrasi publik*, 18(2), 112-130.
- Sari, R., & Yuliana, D. (2024). *Monitoring* berbasis kinerja dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 33-49.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Newbury Park: Sage Publications.
- Sedarmayanti. (2021). *Good governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah* (Edisi revisi). Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, R., & Nugraha, A. (2023). Implementasi evaluasi kinerja dalam peningkatan nilai SAKIP pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 211-227.
- Shapiro, J. (2010). *Monitoring and evaluation*. Johannesburg: CIVICUS.
- Silalahi, U. (2018). *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Smith, K.E., Bambra, C., Hill, S. E., & Hunter, D. J. (2019). *Health inequalities: Critical perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Sopannah, A., & Wahyudi, I. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 421-435.
- Stockmann, R., Meyer, W., & Taube, L. (2020). *The institutionalisation of evaluation in Europe*. London: Palgrave Macmillan.
- Stufflebeam, D.L., & Coryn, C.L.S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiro. (2020). *Evaluasi kebijakan pendidikan: Teori, konsep, dan implementasi dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. 2). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). Kebijakan berbasis bukti: Peluang dan tantangan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 103-122.
- Sumarto, S., & Dewi, F. K. (2022). *Social protection and poverty reduction in Indonesia: Progress, challenges and future directions*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Suryadi, T., & Pramono, H. (2022). Evaluasi kinerja dan akuntabilitas program pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 45-61.
- Suryana, Y. (2017). *Pengembangan ekonomi lokal: Strategi pemberdayaan UMKM dan potensi daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, D., Kurniawan, T., & Rahman, F. (2023). Implementasi *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat pada pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 67-82.
- Suryani, T., & Kurniawan, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(2), 156-172.

- Syafirman, S., & Syamsir, S. (2024). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja ASN di Dinas Dukcapil Padang Pariaman. *Jurnal Sosial Humaniora*, 17(2), 88-104.
- Turmuzi, I. H., Mellenia, D., & Fadhlih, U. I. (2023). Implementasi teknologi big data di pemerintahan Indonesia. *Jurnal Jawara*, 1(1), 1-5.
<http://ejournal.universitasmandiri.ac.id/index.php/jsi/article/view/25>
- UN DESA. (2024). *United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- UNESCO. (2022). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO.
- United Nations Development Programme. (2021). *Evaluation for sustainable development goals: Lessons from global practice*. New York: UNDP.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- van Ooijen, C., Ubaldi, B., & Welby, B. (2019). *A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, inclusive and trustworthy governance*. OECD Working Papers on Public Governance, No. 33.
- Vedung, E. (2017). *Public policy and program evaluation*. New York: Routledge.
- Wahyudi, F. A., & Putri, N. E. (2024). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1).
<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.185>
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for studying programs and policies* (2nd ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- White, H. (2013). Impact evaluation: The experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank. *American Journal of Evaluation*, 31(2), 219-228.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2015). *Handbook of practical program evaluation* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Wibawa, S. (2011). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A., & Hidayati, S. (2024). Digitalisasi evaluasi program pemerintah dalam mendukung akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 78-95.
- Widiastuti, I., & Cakranegara, P. A. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 480-486.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2018). *Kebijakan publik di era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wirawan. (2019). *Evaluasi: Teori, model, metodologi, standar, aplikasi, dan profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector: Applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596-615.
- World Bank. (2004). *Monitoring and evaluation: Some tools, methods and approaches*. Washington: The World Bank.
- World Bank. (2017). *Big data in action for government: Big data innovation in public services, policy, and engagement*. Washington: World Bank.
- World Bank. (2022). *Data for better governance and development outcomes*. Washington: World Bank.
- World Bank. (2022). *GovTech maturity index, 2022 update: Trends in public sector digital transformation*. Washington: World Bank.
- World Bank. (2023). *Digital development overview: Leveraging technology for public sector performance*. Washington: The World Bank.
- World Bank. (2023). *Monitoring and evaluation for effective public sector governance*. Washington: World Bank Publications.
- World Bank. (2023). *Results-based management and public sector performance measurement*. Washington: World Bank Publications.

Yuliani, N., & Setiawan, H. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(3), 201-217.

PROFIL PENULIS & EDITOR

Hendra Permana, S.Pd., M.A.P.



Penulis merupakan akademisi yang memiliki perhatian dan kompetensi dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik. Saat ini, mengabdikan diri sebagai dosen pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nurtanio Bandung, juga aktif sebagai tutor mata kuliah *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan Publik dan mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik di FHISIP Universitas Terbuka.

Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta dan berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.), Ketertarikan yang kuat terhadap dinamika kebijakan publik dan manajemen pemerintahan mendorong penulis melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik (M.A.P.) di Universitas Nurtanio Bandung, Perpaduan latar belakang pendidikan dan pengalaman akademik tersebut memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami berbagai persoalan administrasi publik, implementasi kebijakan, serta pengukuran kinerja sektor pemerintahan.

Sebagai peneliti, penulis menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA. Beberapa publikasi yang telah dihasilkan antara lain Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung serta Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Melalui karya-karya tersebut, penulis menunjukkan konsistensinya dalam mengkaji efektivitas implementasi kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Pengalaman akademik dan penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan buku *"Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern"*, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pengambil

kebijakan dalam memahami dan mengembangkan sistem *monitoring* dan evaluasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Yunita Fourina Dewi, S.P., M.Si.



Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang Administrasi Publik yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan tata kelola organisasi modern, manajemen publik, serta transformasi sumber daya manusia di era digital dan berkelanjutan. Lahir di Madiun pada tahun 1969, penulis menempuh pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor dan berhasil meraih gelar Sarjana (S.P.) pada tahun 1994. Ketertarikannya terhadap isu-isu administrasi, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan mendorong penulis melanjutkan studi Magister Administrasi Publik di Universitas Krisnadwipayana dan menyelesaikannya pada tahun 2019.

Sebagai dosen dengan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Asisten Ahli, penulis aktif mengembangkan pendidikan tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai mata kuliah yang diampu antara lain Manajemen Aset Publik, Ekonomi Publik dan Politik, Governansi Digital, Manajemen Perkantoran, serta Pengantar Administrasi Publik. Pada periode 2019-2024, penulis mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi Bandung. Sejak tahun 2024 hingga saat ini, penulis menjadi Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Nurtanio Bandung dengan bidang kepakaran yang berfokus pada Manajemen Aset Publik, Ekonomi Publik dan Politik, serta Governansi Digital. Selain menjalankan tugas akademik, sejak tahun 2025 penulis juga tergabung sebagai anggota Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia sebagai wujud partisipasi aktif dalam memperkuat kolaborasi dan jejaring akademisi di tingkat nasional.

Penulis aktif terlibat sebagai peneliti dan tenaga ahli dalam berbagai kegiatan profesional yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, manajemen organisasi publik, serta inovasi pelayanan publik. Pengalaman akademik dan profesional tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

administrasi publik sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, dan pengambil kebijakan dalam membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja publik.

Dr. Susniwati, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Ogan Komering Ulu pada tanggal 11 Juli 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Kampus Bandung. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister (S2) dan Doktor (S3) di Universitas Diponegoro Semarang dalam bidang yang berkaitan dengan administrasi publik dan kebijakan pemerintahan.

Sejak tahun 1999 hingga 2024, penulis berkarier sebagai dosen tetap pada program Sarjana dan Pascasarjana di STIA Bandung serta Universitas Bandung. Pengalaman akademik yang panjang tersebut telah mengantarkannya menjadi salah satu akademisi yang aktif dalam pengembangan ilmu administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta manajemen sektor publik. Sejak tahun 2025, penulis melanjutkan pengabdianannya sebagai Dosen Tetap Program Pascasarjana di Universitas Garut.

Dalam perjalanan akademiknya, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai hasil penelitian dan karya ilmiahnya telah dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, khususnya yang berkaitan dengan administrasi publik, kebijakan publik, reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta evaluasi kinerja pemerintahan. Kepakaran dan pengalaman yang dimiliki menjadikan penulis konsisten berkontribusi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, penulis berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, metode, serta praktik *monitoring* dan evaluasi kebijakan publik sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berbasis kinerja. Email: susniwati@yahoo.com

Jiwa Riwayanti, S.IP., M.E.Sy., M.A.P.



Penulis merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan administrasi publik, kebijakan publik, serta tata kelola organisasi modern. Lahir di Bandung pada 2 November 1979, saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nurtanio Bandung.

Dengan perpaduan pengalaman akademik dan profesional, penulis memiliki minat kajian pada bidang administrasi publik, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, serta penguatan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Pendidikan Sarjana (S1) Administrasi Negara diselesaikan di Universitas Padjadjaran pada tahun 2003. Selanjutnya, beliau meraih gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.Sy.) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015 dan gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2020. Komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terus diwujudkan melalui studi doctoral (S3) pada Program Doktor Administrasi Publik Universitas Padjadjaran yang saat ini sedang ditempuh. Latar belakang pendidikan yang multidisipliner memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami isu-isu kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan organisasi.

Sebelum berkiprah di dunia akademik, penulis memiliki pengalaman profesional sebagai pegawai tetap pada salah satu perusahaan BUMN selama periode 2003-2015. Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya mengenai manajemen organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan implementasi kebijakan dalam lingkungan kerja profesional. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai tenaga ahli lepas (*freelance*) di bidang kebijakan publik dan ekonomi pada berbagai kantor konsultan. Pengalaman akademik dan praktis tersebut menjadi modal penting dalam penyusunan buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta

pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dr. Mokhammad Wahyudin, M.Pd.



Penulis lahir di Bekasi pada 18 Desember 1990. Penulis merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan ekonomi, ekonomi syariah, serta pengembangan tata kelola organisasi dan kebijakan publik. Pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Ekonomi diselesaikan di Universitas Swadaya Gunung Jati

Cirebon pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi Magister Pendidikan (S2) di Universitas Kuningan dan lulus pada tahun 2016. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan membawanya menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 2024.

Saat ini, penulis, mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon dengan bidang pengajaran utama Ekonomi Syariah. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga dipercaya mengemban jabatan struktural sebagai Dekan Fakultas Syariah, yang berperan dalam pengembangan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman kepemimpinan tersebut memperkuat pemahamannya mengenai tata kelola kelembagaan, pengukuran kinerja organisasi, serta implementasi kebijakan di lingkungan pendidikan dan pemerintahan.

Di samping kiprahnya sebagai akademisi, penulis juga aktif di dunia usaha sebagai Direktur CV Titi Rottan Basket Indonesia yang bergerak di bidang ekspor produk kerajinan. Pengalaman yang memadukan dunia akademik, manajerial, dan bisnis memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami pentingnya *monitoring* dan evaluasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, akuntabilitas publik, dan kinerja organisasi. Melalui buku ***Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern***, penulis berupaya memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dr. Atik Rochaeni, Dra., M.Si.



Penulis merupakan akademisi senior yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang ilmu pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan. Saat ini penulis mengabdikan sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani dengan Jabatan Fungsional Lektor

Kepala. Dedikasinya dalam dunia pendidikan tinggi diwujudkan melalui kegiatan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan kapasitas pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Pendidikan tinggi ditempuh dengan meraih gelar Doktoranda (Dra.) dari Universitas Pasundan pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan Magister Sains (M.Si.) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2000, dan memperoleh gelar Doktor (S.3) dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2013. Sebagai peneliti, penulis aktif mengkaji berbagai isu politik dan pemerintahan, khususnya terkait dinamika partai politik dan demokrasi lokal. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain *Kekuatan Partai Politik Islam dalam Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Jawa Barat*, yang menyoroti peran dan eksistensi partai politik Islam dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Selain aktif dalam penelitian, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya *Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Desa Pusakaratu Kabupaten Subang* serta *Pendampingan UMKM dalam Mewujudkan Digitalisasi Desa di Desa Putridalem Kabupaten Majalengka*. Kontribusi akademiknya juga diwujudkan melalui publikasi buku referensi, antara lain *Ekologi Pemerintahan* (2024) dan *Pembangunan dan Kesejahteraan Publik* (2025). Berbekal pengalaman akademik, penelitian, dan pengabdian yang luas, penulis turut menghadirkan perspektif yang komprehensif dalam buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, sebagai kontribusi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Gina Sofia Rahman, S.IP., M.A.P.



Penulis lahir di Ciamis pada 25 Januari 1991. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nurtanio Bandung. Sebagai akademisi muda di bidang administrasi publik, penulis memiliki minat yang kuat terhadap kajian kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengembangan organisasi sektor publik yang adaptif terhadap tuntutan perubahan dan inovasi di era modern.

Pendidikan Sarjana (S1) Administrasi Negara diselesaikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik (M.AP.) di Universitas Padjadjaran dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan landasan akademik yang kuat dalam memahami dinamika administrasi pemerintahan, implementasi kebijakan publik, serta manajemen sektor publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berkarier sebagai dosen, penulis memiliki pengalaman profesional dengan bekerja di Pengadilan Agama Ciamis, yang memberikan wawasan praktis mengenai administrasi kelembagaan, pelayanan publik, dan tata kelola organisasi sektor pemerintahan. Perpaduan pengalaman akademik dan profesional tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, penulis berupaya memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi kebijakan yang efektif guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Dr. Hj. Arnie Fajar, M.Pd.



Penulis merupakan akademisi senior yang memiliki dedikasi tinggi dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, tata kelola kelembagaan, pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta karakter kewarganegaraan. Lahir di Semarang, Jawa Tengah, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Suruh, Salatiga, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMP dan SMA Negeri 1 Salatiga. Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan lulus pada tahun 1986. Selanjutnya, penulis meraih gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada tahun 2004 dan menyelesaikan Program Doktor Pendidikan IPS di universitas yang sama pada tahun 2008.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen pada Program Magister Pendidikan IPS dan Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di STKIP Pasundan Cimahi. Selain melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengemban amanah sebagai Gugus Kendali Mutu yang berperan dalam penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pengalaman kepemimpinan akademik yang dimiliki sangat beragam, di antaranya sebagai Kepala Satuan Audit Internal (SAI), Sekretaris Divisi Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Perkumpulan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI), Ketua Bidang Keilmuan dan Keprofesian Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Jawa Barat, serta Anggota Dewan Penasehat Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia.

Kontribusi penulis juga terlihat dalam berbagai program strategis nasional, antara lain sebagai Tim Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Ketua Tim Materi Pendidikan Antikorupsi, Pendidikan Lalu Lintas, Pendidikan Keuangan, dan Pendidikan Karakter pada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan KPK, POLRI, dan Bank Indonesia. Penulis telah menulis berbagai panduan, pedoman, dan buku

pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun penerbit lainnya, serta aktif mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional.

Arus Reka Prasetia, S.E., M.M.



Penulis merupakan akademisi yang memiliki perhatian besar pada pengembangan manajemen, komunikasi kreatif, serta strategi organisasi modern. Lahir di Jakarta, penulis telah aktif mengabdikan diri di dunia pendidikan tinggi sejak tahun 2001 sebagai pengajar pada Fakultas Desain Komunikasi Visual dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Dalam aktivitas akademiknya, penulis dikenal memiliki pendekatan yang mengintegrasikan perspektif manajerial dan kreativitas untuk menghasilkan pembelajaran yang inovatif, adaptif, serta relevan dengan kebutuhan dunia bisnis dan organisasi modern.

Pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) ditempuh di Universitas Terbuka, kemudian melanjutkan studi Magister Manajemen (M.M.) di Universitas Padjadjaran. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan fondasi yang kuat dalam memahami berbagai aspek manajemen, pemasaran, komunikasi, dan pengembangan organisasi. Dengan pendekatan multidisipliner yang dimiliki, penulis mampu mengkaji berbagai fenomena organisasi dari perspektif strategis sekaligus kreatif, sehingga menghasilkan pemikiran yang aplikatif dalam menjawab tantangan tata kelola dan manajemen di era perubahan yang dinamis.

Dalam kegiatan akademik dan penelitian, penulis memiliki minat kajian pada bidang *branding*, manajemen pemasaran, manajemen strategi, media dan komunikasi, manajemen internasional, serta desain komunikasi visual. Selain aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beliau juga berkontribusi sebagai *reviewer* pada berbagai jurnal nasional. Pengalaman lintas disiplin yang dimiliki menjadi modal penting dalam memberikan perspektif mengenai komunikasi organisasi, kualitas layanan, dan strategi pengelolaan institusi. Melalui buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, penulis turut memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi yang efektif guna mendukung tata kelola organisasi dan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kinerja.

Hendri Darma Putra, S.H., M.H.



Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS). Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dengan fokus pengembangan keilmuan di bidang hukum tata negara.

Dalam bidang akademik, penulis aktif sebagai dosen sejak tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis juga aktif sebagai peneliti serta menjadi tutor pada Universitas Terbuka. Keterlibatannya dalam dunia akademik diperkuat dengan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar, pelatihan profesi hukum, serta publikasi ilmiah yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Di bidang profesi hukum, penulis memiliki pengalaman yang luas sebagai advokat dan konsultan hukum. Saat ini penulis menjabat sebagai *Managing Partner* HDPP Law Firm, serta aktif sebagai konsultan hukum pengadaan barang dan jasa. Pengalaman profesionalnya juga mencakup jabatan sebagai *Corporate Lawyer* pada Rumah Sakit Humana Prima 2023 s.d sekarang, PT Griya Pratama dan Konsultan Hukum pada Bank BJB pada periode 2020-2021. Kompetensi penulis dalam penyelesaian sengketa juga ditunjukkan melalui perannya sebagai Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung dan Arbiter pada Dewan Sengketa Indonesia.

Selain berkiprah dalam dunia akademik dan praktik hukum, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi profesi dan lembaga hukum. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung periode 2018-2022 dan Ketua Dewan Sengketa Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2022-2023. Saat ini penulis juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Advokat Indonesia Kota Bandung, Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Dewan Sengketa

Indonesia Provinsi Jawa Barat dan terlibat dalam pengawasan profesi kenotariatan sebagai bagian dari Majelis Pengawas Notaris.

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi, peneliti, dan pengabdian masyarakat yang memiliki dedikasi panjang dalam pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Sejak tahun 1990 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Politeknik Negeri Jakarta dengan mengampu berbagai mata kuliah di bidang hukum, antara

lain Hukum Bisnis, Hukum Asuransi, dan Hukum Ketenagakerjaan. Dalam aktivitas akademiknya, penulis tidak hanya fokus pada kegiatan pengajaran, tetapi juga aktif dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola organisasi modern.

Dalam perjalanan karier profesionalnya, penulis memiliki pengalaman kepemimpinan di berbagai lembaga akademik maupun organisasi nasional. Beberapa posisi strategis yang pernah diemban antara lain Komisaris PT Indonesia Kreatif Nusantara periode 2020-2021, Anggota Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2021-2025, Sekretaris Senat Politeknik Negeri Jakarta, Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) PNJ, serta Koordinator Penelitian pada Asosiasi Doktor Hukum Indonesia. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya sebagai Ketua Yayasan IKDU Indonesia Hijau dan Sekretaris Dewan Pembina WPUI Pusat. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen penulis dalam mengembangkan sinergi antara dunia akademik, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai akademisi yang produktif, telah menghasilkan lebih dari 40 buku yang sebagian besar merupakan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah dan inovasi, seperti penyusunan naskah akademik, model kebijakan publik, serta pengembangan sistem informasi berbasis masyarakat, di antaranya Sistem Informasi Desa Wisata Indonesia (SIDEWINESIA) dan sistem pengelolaan serta pemasaran UMKM. Atas dedikasi dan kontribusinya, penulis menerima berbagai penghargaan, antara lain Dosen Berprestasi Politeknik Negeri Jakarta (2009), Finalis Dosen Berprestasi Nasional DIKTI (2009), *The Women*

Preneur Award (2009), serta Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 10, 20, dan 30 Tahun dari Pemerintah Republik Indonesia.

Dr. Diana Sukorina, S.Sos., M.Si., C.Med.



Penulis merupakan akademisi dan peneliti di bidang administrasi publik yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan organisasi modern, tata kelola publik, serta pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif dan berkelanjutan. Lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 3 Juni 1980, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2

Tanjung Mas dan lulus pada tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Semarang hingga tahun 1995. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMK Negeri 2 Semarang pada tahun 1998. Ketertarikan penulis terhadap bidang komunikasi dan kebijakan publik mendorongnya melanjutkan pendidikan tinggi pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro dan meraih gelar Sarjana pada tahun 2007.

Komitmen penulis dalam pengembangan ilmu administrasi publik diwujudkan melalui pendidikan lanjutan pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Diponegoro yang diselesaikan pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi doktoral pada Program Doktor Administrasi Publik di universitas yang sama dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2020. Latar belakang akademik tersebut memberikan landasan yang kuat dalam memahami tata kelola organisasi, kebijakan publik, inovasi administrasi, serta pengembangan sumber daya manusia di era transformasi digital dan keberlanjutan.

Dalam perjalanan karier akademiknya, penulis sebagai dosen tetap pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Surakarta dengan jabatan fungsional Lektor. Selain menjalankan aktivitas pengajaran dan penelitian, penulis juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan akademik. Sejak tahun 2023 hingga 2027, penulis dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi di lingkungan universitas tersebut. Pengalaman akademik dan organisatoris yang dimiliki memperkuat kontribusinya dalam pengembangan inovasi organisasi, tata kelola publik, serta pemberdayaan bisnis desa berbasis teknologi.

Dr. Praniko Imam Sagita, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi dan peneliti di bidang hukum yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan hukum tata negara, hak asasi manusia, kebijakan publik, serta sistem peradilan di Indonesia. Saat ini penulis mengabdikan sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS).

Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, penulis aktif berkontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat, pemerintahan, dan perubahan regulasi di era modern.

Pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) diselesaikan di Universitas Palembang pada tahun 2005, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Pasundan dan lulus pada tahun 2008. Komitmennya terhadap pengembangan keilmuan hukum terus berlanjut hingga meraih gelar Doktor (S.3) dari Universitas Pasundan pada tahun 2023. Latar belakang akademik tersebut memberikan fondasi yang kuat dalam memahami berbagai isu hukum, mulai dari hukum ketatanegaraan, kebijakan legislasi, perlindungan hak-hak warga negara, hingga penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia.

Sebagai peneliti, penulis aktif mengkaji berbagai isu strategis di bidang hukum dan kebijakan publik. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain *Mekanisme Pengawasan terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia* (2026) serta *Implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhadap Hak atas Peradilan yang Adil bagi Penyandang Disabilitas Intelektual* (2026). Selain itu, penulis juga menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, di antaranya *Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the Right to a Fair Trial for Persons with Intellectual Disabilities* (2024), *Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Berlandaskan Falsafah Pemidanaan yang Integratif dalam Menanggulangi Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia* (2025), serta *Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia* (2026). Pengalaman akademik dan penelitian tersebut menjadi landasan penting

dalam memberikan kontribusi pada buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, khususnya dalam perspektif pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum.

Dr. Oom Yomi Romlah, M.Pd.



Penulis merupakan akademisi yang aktif berkiprah dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, administrasi publik, kebijakan publik, dan pengembangan kewirausahaan. Saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen tetap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Pasundan. Dengan pengalaman panjang dalam dunia pendidikan tinggi, penulis memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, tata kelola publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Perjalanan akademiknya dimulai dengan menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan (S1) di STKIP Pasundan pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis meraih gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (M.Pd.) di STKIP Pasundan pada tahun 2009 dan memperoleh gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Pasundan pada tahun 2020. Dalam aktivitas akademik, penulis aktif mengampu mata kuliah Kebijakan Publik dan Pendidikan Kewirausahaan, yang menjadi bidang kajian utama dalam pengembangan keilmuan dan penelitian yang dilakukannya.

Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis memiliki pengalaman profesional yang luas, di antaranya sebagai Asesor Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 134 Universitas Pasundan Bandung pada periode 2010-2016 serta Tim Juri Pelajar Pancasila Antar-SMP se-Kota Cimahi pada tahun 2021 dan 2022. Penulis juga aktif mengikuti berbagai forum ilmiah internasional, seperti *The 1st International Conference for Interdisciplinary Studies (ICIS)* di Youngs University, Korea Selatan (2014) dan *The 1st International Seminar for Development for Various Studies (ISDS)* di Guangdong University of Foreign Studies, Tiongkok (2015). Di luar dunia akademik, penulis aktif dalam pengembangan UMKM di Kota Cimahi dan pernah menjabat sebagai Bendahara IWAPI Kota Cimahi periode 2004-2014. Berbekal pengalaman akademik, organisasi, dan pemberdayaan masyarakat yang luas, penulis Romlah turut memberikan kontribusi pemikiran dalam buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran*

Kinerja Pemerintahan Modern, khususnya dalam perspektif kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Raden Minda Kusumah, S.E., M.M.



Editor merupakan akademisi, editor, peneliti, dan praktisi pendidikan tinggi yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan manajemen organisasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, kewirausahaan, serta penguatan sumber daya manusia di era transformasi digital. Lahir di Subang, Jawa Barat, penulis menyelesaikan pendidikan

Sarjana (S1) dan Magister (S2) di bidang Manajemen. Sejak tahun 2015, penulis aktif mengabdikan diri sebagai dosen dengan jabatan fungsional Lektor dan saat ini sebagai Dosen Tetap Politeknik Pajajaran ICB Bandung. Pengalaman akademik yang dimiliki menjadi landasan penting dalam mengembangkan perspektif teoritis dan praktis terkait manajemen publik, pengukuran kinerja organisasi, serta evaluasi program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain berkiprah di dunia akademik, editor aktif dalam berbagai organisasi profesi dan pengembangan pendidikan tinggi. Melalui berbagai aktivitas organisasi, penulis berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dosen, penguatan budaya penelitian, pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, serta mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang adaptif terhadap tantangan global. Keterlibatan aktif dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat, seminar nasional, dan kerja sama kelembagaan turut memperkaya wawasan beliau dalam bidang kebijakan publik dan manajemen pemerintahan.

Dalam bidang kepenulisan dan penelitian, editor telah menghasilkan puluhan buku ber-ISBN yang telah memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya pada bidang manajemen, kewirausahaan, pendidikan, tata kelola organisasi, dan kebijakan publik. Karya-karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi. Selain itu, aktif sebagai *reviewer* dan editor jurnal ilmiah di berbagai perguruan tinggi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas publikasi akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*

ini, berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya *monitoring* dan evaluasi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Desta Sulaesih Mursyidah, S.E., M.M.



Editor merupakan akademisi, editor, dan peneliti yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan manajemen, kebijakan publik, kewirausahaan, pemasaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi di era modern. Lahir di Jakarta pada 4 Desember, editor memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang manajemen dengan menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen (S1) dan Magister Manajemen (S2) di Universitas Kristen Maranatha. Saat ini, editor aktif mengabdikan diri sebagai Dosen Tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio Bandung.

Dalam pengembangan kompetensi profesional, editor telah memperoleh sertifikasi *Certified Digital Marketing Strategy* (CDMS) yang memperkuat keahliannya dalam bidang pemasaran digital dan transformasi organisasi berbasis teknologi. Selain menjalankan peran sebagai pendidik, editor juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia dan Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Jawa Barat. Keterlibatan dalam organisasi tersebut mencerminkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi, penguatan budaya penelitian, serta pengembangan kolaborasi akademik yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik profesional. Berperan sebagai *reviewer* dan editor pada berbagai jurnal ilmiah sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga mutu publikasi akademik dan pengembangan literatur ilmiah di Indonesia.

Sebagai akademisi dan peneliti, editor memiliki fokus kajian pada strategi pemasaran digital, perilaku konsumen, *green business*, inovasi organisasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai penelitian, publikasi ilmiah, seminar nasional, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan yang diikutinya telah memperkaya wawasan serta pengalaman praktis dalam menghubungkan teori dengan kebutuhan nyata di lapangan. Melalui keterlibatannya sebagai editor buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern*, editor berupaya menghadirkan perspektif

yang komprehensif mengenai pentingnya *monitoring* dan evaluasi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan.

Buku *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Implementasi, dan Strategi Pengukuran Kinerja Pemerintahan Modern* hadir sebagai referensi komprehensif yang membahas konsep, teori, metode, dan praktik *monitoring* serta evaluasi kebijakan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan modern. Buku ini menguraikan secara sistematis mulai dari konsep dasar *monitoring* dan evaluasi, teori dan paradigma kebijakan publik, siklus kebijakan, perencanaan *monitoring* dan evaluasi, hingga penyusunan indikator dan pengukuran kinerja pemerintahan.

Pembahasan disajikan secara terstruktur dengan mengintegrasikan pendekatan administrasi publik modern, *good governance*, dan *evidence based policy* sebagai landasan dalam memahami pentingnya *monitoring* dan evaluasi sebagai instrumen peningkatan kualitas kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain membahas aspek konseptual, buku ini juga mengupas berbagai metode *monitoring* dan evaluasi, teknik pengumpulan serta analisis data, pemanfaatan teknologi digital, *big data*, dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan kebijakan publik. Berbagai studi kasus, praktik terbaik di Indonesia dan negara maju, serta tantangan implementasi *monitoring* dan evaluasi di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan lingkungan turut disajikan untuk memperkaya pemahaman pembaca.

Dengan pendekatan yang teoritis sekaligus aplikatif, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, aparatur pemerintah, evaluator kebijakan, serta para praktisi sektor publik dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di era transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan.

